

## Smong: Kearifan Lokal Sebagai Bentuk Warisan Budaya Mitigasi Bencana Masyarakat Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam

Ambar Teguh Sulistiyani<sup>1</sup>, Miladiyahu Tsania Zulfa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Public Policy and Management Program Program, Faculty of Social and Political Sciences.  
Gadjah Mada University, Yogyakarta

### Abstract

Indonesia is often hit by disasters but disaster management has not been optimal. The focus of disaster management is only on post-disaster. Meanwhile, a post-disaster management approach alone will not be able to control the impact of a disaster early. This paper aims to analyze improvements in disaster mitigation for responsiveness in dealing with disasters both pre, during and post-disaster using local wisdom in the form of the "Smong" cultural heritage originating from Aceh. The research method uses descriptive qualitative. Data collection through interviews as primary data and literature study as secondary data. The research results show that disaster management is known to include pre-disaster, during disaster and post-disaster. Pre-Disaster Response Attitude as a state of mind is known in social change and community development. State of mind becomes a distinctive nuance that depicts society's social values. State of mind also informs about social changes that have occurred on a broad or narrow scale in the development system that has been experienced. Local wisdom is a form of state of mind. Local wisdom in Simelue is a continuous community learning process as communication in the face of disasters. These skills form pre-disaster response attitudes and are passed down from generation to generation. The results of the internalization of "smong" values have been a blessing so that almost all residents of Simeulue Island achieved fantastic safety during the 2004 tsunami.

**Keywords:** local wisdom, disaster management, pre-disaster response, "smong".

### Pendahuluan

Bencana adalah sesuatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, dengan tempo/waktu yang sangat cepat, yang menimbulkan kerusakan, kerugian, kesakitan, kematian maupun kepunahan manusia dan lingkungan alam, yang dapat dipicu oleh kondisi kritis tertentu, peristiwa alamiah, maupun disebabkan oleh akumulasi perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam

memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Akibat dari bencana antara lain adalah timbulnya penderitaan yang meluas dan berkepanjangan, sehingga terjadi situasi stress baik yang dirasakan individu maupun kelompok atau komunitas tertentu.

Sebuah pertanyaan tentang mengapa dunia selalu terhenyak seolah tersadar dari mimpi setiap terjadi suatu bencana. Bencana alam selalu dengan sangat cepat dan tidak

\*) Corresponding Author

Email : [ambarteguh@ugm.ac.id](mailto:ambarteguh@ugm.ac.id)

mudah dikenali gejalanya. Walaupun tidak semua bentuk bencana merupakan sebuah misteri yang tidak mungkin terkuak dan diprediksi, namun kenyataan setiap bencana diiringi oleh sebuah ketidakpastian. Hipotesis demikian patut dilontarkan sebagai titik tolak introspeksi, untuk selanjutnya mengambil langkah strategis dalam manajemen bencana secara menyeluruh.

Secara umum penanganan bencana hanyalah terfokus pada penanganan pasca bencana, artinya belum secara utuh mulai dari sejak dari sebelum, saat terjadi dan sesudah bencana. Pengembangan ke arah kesiapsiagaan bencana telah dilakukan, namun masih sebatas kalangan tertentu. Manajemen pasca bencana selalu mengalami hambatan-hambatan, baik hambatan fisik akibat rusaknya semua infrastruktur dan tidak tersedianya sarana transportasi cukup, hambatan organisasi yang secara struktural seringkali tidak jelas saluran koordinasi namun dilingkupi oleh aturan bertele-tele (*red tape*), hambatan kurang terjaminnya penyaluran sumbangan dan tidak jelasnya akuntabilitas, kecenderungan kekhawatiran berlebih terhadap aksi kemanusiaan dari pihak luar, dan masih banyak lagi. Pada hakikatnya fakta itu menggambarkan ketidaksiapan dalam melakukan *recovery* pasca bencana. Realitas ini membuktikan bahwa pada umumnya sikap masyarakat dan pemerintah memandang bencana selalu merupakan hal baru, mengejutkan, sebuah misteri yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diantisipasi. Kondisi demikian semakin dikuatkan oleh perluasan dampak akibat bencana yang sulit dikontrol dan dikendalikan.

Pada saat terjadinya bencana seringkali tidak terlihat antisipasi secara maksimal terhadap kemungkinan perluasan dampak bencana. Hampir semua masyarakat tidak memahami cara-cara penyelamatan diri secara darurat, bahkan terlambat menyadari datangnya bencana. Hal itulah yang sesungguhnya perlu diperhatikan supaya dampak bencana tidak meluas, namun pada kenyataannya masih terabaikan. Bertolak dari sini makin kuat dugaan bahwa selama ini masyarakat dan pemerintah tidak menghiraukan penanganan preventif sebelum bencana dan bahkan penanganan antisipatif selama bencana. Akibat dari sikap preventif dan antisipatif yang sangat kurang, maka korban menjadi lebih banyak. Dan setelah jatuh korban mencapai puluhan bahkan ratusan ribu serta kerugian material yang tidak ternilai harganya, barulah terperangah akan maha dahsyatnya bencana yang baru melanda.

Pendekatan manajemen pasca bencana saja tidak akan mampu mengendalikan dampak bencana secara dini. Belajar dari bencana gempa dan tsunami 2004 silam karena interaksi atau pergerakan lempeng tektonik yang terjadi di kawasan Samudera Hindia tepatnya di sekitar Pulau Simeuleu Aceh dengan kekuatan 8,9 Skala Richter telah mengakibatkan tsunami. Tsunami dengan korban jiwa ratusan ribu manusia yang menjamah 10 negara, kerusakan lingkungan Indonesia (Siregar N, 2017). Selain dampak secara psikis, Tsunami Aceh menyadarkan akan pentingnya memperhatikan setiap tahap penanggulangan bencana. Berbagai literatur membahas mengenai penanggulangan bencana dikenal

penanganan *pra disaster*, *during disaster* dan *pasca disaster*. *Pra disaster* atau *pra bencana* merupakan tindakan preventif mencakup pencegahan, mitigasi, dan peringatan dini. Tahap *during disaster* atau saat bencana mencakup kegiatan tanggap darurat sebagai tindakan antisipatif. Tahap *pasca disaster* atau *pasca bencana* sebagai pemulihan mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi (Stanley Jaya Kumar, 2000).

Penanggulangan bencana melalui berbagai tahap tersebut memerlukan komunikasi bencana efektif. Komunikasi bencana bukan hanya diimplementasikan dalam kondisi darurat bencana saja, namun juga penting pada tahap *pra* dan saat terjadi bencana (Nurdin, 2015). Mengkomunikasikan bencana pada masyarakat dapat dilakukan dengan mengelola risiko bencana secara sinergis, bukan hanya peran pemerintah namun menjadi pencegahan bersama dengan konsep penanggulangan *community based disaster risk management* (Maskrey dalam (Fedryansyah & Pancasilawan, 2018). Pandangan penanggulangan ini menyatakan bahwa masyarakat memiliki sumber dan modal sosial besar dalam penanggulangan bencana, termasuk kearifan lokal yang dimiliki sebagai bentuk resiliensi. Resiliensi dimaknai sebagai ketahanan untuk beradaptasi, belajar, dan mengorganisasikan kembali setelah terjadinya bencana. Perlu membangun hubungan sinergi antar aktor dalam mewujudkan ketahanan bencana (Filimonau & De Coteau, 2020).

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berusaha mengkaji kapasitas kearifan lokal bernama *Smong* di Simeulue Aceh dalam

mengkomunikasikan penanggulangan bencana tsunami dengan mengungkap kelembagaan lokal dalam mewujudkan resiliensi mitigasi bencana.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dimaknai sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari narasumber dan perilaku yang diamati, berupa tulisan dan lisan (Bog dan Taylor dalam (Moleong, 2011)). Pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi literatur berskala nasional maupun internasional yang dikeluarkan oleh berbagai instansi atau lembaga yang terlibat dalam mitigasi kebencanaan.

### Hasil dan Pembahasan

#### Sikap Tanggap Pra Bencana sebagai *State of mind* dalam Perubahan Sosial dan Pembangunan Masyarakat

*State of mind* suatu masyarakat tak ubahnya sebagai kekayaan lokal yang tak ternilai. Dalam pembangunan masyarakat seringkali *state of mind* menjadi suatu nuansa yang khas, mencitrakan nilai sosial masyarakat dan bahkan menginformasikan perubahan sosial yang pernah terjadi pada skala luas atau sempit dalam sistem pembangunan yang pernah dialami. *State of mind* menggambarkan apa yang sejatinya ada dalam masyarakat, berkaitan dengan realitas yang terjadi keseharian di masyarakat. Dengan demikian *state of mind* tidak hanya berupa kemampuan yang bersifat fisik, bangunan, pertumbuhan ekonomi, melainkan separangkat usaha, ide dan sistem yang

ditanamkan dan mampu menjadi kebiasaan riil dalam kehidupan bermasyarakat yang menyumbangkan kemampuan untuk berlangsungnya dan peningkatan kondisi suatu masyarakat. Dalam hal ini sikap tanggap terhadap bencana merupakan sebuah realitas yang diharapkan terpola dalam masyarakat dan menjadi *state of mind*. Sudah waktunya dalam pembangunan dan perubahan sosial menekankan perlunya mengembangkan dan melestarikan *state of mind* masyarakat yang positif, sebab itu merupakan energi masyarakat yang tak ternilai harganya, dan sulit untuk diukur. "Angka-angka statistik tidak cukup peka untuk mengungkap the *state of mind* masyarakat" (Tjokrowinoto, 1995).

Jika ditarik garis lurus antara bencana alam dan pembangunan akan dijumpai posisi yang berbanding terbalik. Semakin sering suatu daerah dilanda bencana maka semakin hancur hasil-hasil pembangunan yang pernah dilakukan, dan semakin besar tuntutan untuk membangun kembali. Bencana yang terjadi dalam suatu kawasan sangat memungkinkan menjadi picu bagi munculnya perubahan sosial. Perubahan sosial dimaksud dapat berupa perubahan positif dan dapat pula negatif. Perubahan sosial yang bersifat positif terjadi jika masyarakat yang terkena bencana kemudian melakukan usaha setelah selamat dari bencana kemudian menyusun kekuatan kembali untuk membangun dan menciptakan kondisi yang aman dengan melakukan sikap tanggap terhadap bencana secara berkelanjutan, dan melakukan usaha untuk melindungi diri dan kawasannya supaya lebih aman. Hal ini dapat berupa nilai-nilai dan sikap

yang dibangun menyangkut pemahaman tentang bencana, tanda-tanda, maupun penyelamatannya. Contoh kasus sikap masyarakat Simeulue pada tahun 1907 yang diterjang tsunami, telah menghasilkan perubahan sosial yang luar biasa dalam bentuk pemikiran (*mindset*) masyarakat tentang tsunami. Selanjutnya terjadi internalisasi penyamaan persepsi dengan media tradisional dari mulut ke mulut akan bahaya tsunami. Berarti saat itu telah terjadi perubahan sosial besar-besaran yang dialami oleh masyarakat Simeulue, dari tidak mengetahui bahaya gempa hebat yang menimbulkan tsunami, menjadi terbuka alam pikiran mereka ; pertama paham akan risiko sebuah gempa besar di dasar laut dapat menyebabkan tsunami, kedua paham akan cara-cara penyelamatan diri dengan berlari ke tempat tinggi (bukit), ketiga, perlunya mengkomunikasikan kepada generasi berikutnya, keempat, munculnya kesepakatan tidak tertulis bahwa gelombang tinggi dan air bah tersebut dinamakan "smong", kelima, adanya ikatan sosial budaya bahwa setiap orang wajib menuturkan "smong" kepada anak cucunya, keenam terciptanya kekuatan lokal yang mengkristal dalam bentuk budaya menghadapi "smong".

Bertolak dari pengalaman dalam kasus tersebut, perubahan sosial terjadi dengan tambahnya konsep dan kosa kata "smong" di pulau itu untuk memberikan istilah gelombang tinggi dan air bah. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat sesungguhnya telah melakukan pembangunan sosial khususnya berkaitan dengan sikap dan sosial budaya masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami.

Bagaimanapun peristiwa tersebut merupakan momentum tumbuhnya pranata sosial tak tertulis yang membimbing masyarakat untuk selamat dari bencana tsunami. Masyarakat telah melakukan proses pembangunan dalam rangka mencapai konsep dan ragam hidup yang lebih baik. Bencana tsunami dapat mempengaruhi dan menghancurkan peradaban manusia, sehingga selalu diperlukan sebuah ragam hidup yang dapat mengantisipasi keadaan ini, sehingga peradaban masyarakat dapat lebih terjaga. Tindakan antisipasi berbasis lokal tersebut merupakan pembangunan masyarakat sekaligus pembangunan sosial. "Pembangunan masyarakat dapat dipandang dalam arti luas sebagai perubahan sosial yang terencana yang berusaha meningkatkan dan perbaikan masyarakat secara umum dari segi budaya, ekonomi, sosial, politik dan agama. Sedangkan pembangunan masyarakat dalam arti sempit berarti perubahan sosial berencana pada lokalitas atau komunitas tertentu...." (Supriatna, 2000: 67-68)

Bagaimanapun kasus di atas sebagai proses panjang yang dilalui dari 1907-2004, telah memberikan makna yang agung bagi masyarakat Simeulue, dan dapat menjadi bahan pembelajaran pada masyarakat lainnya, sebagai bentuk pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri. Jika hal ini disadari oleh pemerintah maupun masyarakat, sesungguhnya dapat sebagai fondasi bangunan budaya lokal yang bermanfaat dan mengilhami strategi pembangunan fisik maupun sosial selanjutnya pada kawasan tersebut, supaya lebih aman atas kemungkinan datangnya bencana serupa dengan penguatan kelembagaan lokal baik

sosial budaya, kepedulian, dan memelihara lingkungan sebagai upaya mewujudkan ketahanan.

Guna mewujudkan penanganan preventif dan antisipatif suatu bencana diperlukan sikap tanggap terhadap bencana. Sikap tanggap tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan harus terpatri ke dalam kehidupan sehari-hari. Bencana selalu datang secara tiba-tiba, saat yang tak terduga secara pasti. Namun demikian prediksi akan datangnya bencana sesungguhnya dapat dijadikan sebagai suatu ancaman untuk membentuk sikap masyarakat dan pemerintah sehingga tanggap terhadap bencana. Mengingat sikap itu harus melekat pada setiap pribadi, maka diperlukan adanya proses internalisasi kepada semua warga. Proses internalisasi tersebut melalui mekanisme pembelajaran masyarakat di dalam mengenali gejala dan perubahan perilaku lingkungan sekitar.

Pada situasi yang stabil pada umumnya lingkungan bersifat bersahabat dengan manusia, misalnya sungai yang besar berair tenang dapat dilayari manusia dengan perahu, gunung yang menjulang tinggi meniupkan udara segar dan menyediakan berbagai kebutuhan dan satwa liar hidup tenteram di dalamnya, laut dengan gelombang teratur dapat diseberangi dengan kapal bahkan nelayan dapat menjaring ikan dengan perahu motor, hutan yang rimbun telah menyumbangkan konservasi air. Apabila lingkungan alam telah berubah dan kehilangan stabilitasnya, maka akan terjadilah bencana. Namun sebelum menunjukkan kegarangannya alam akan memperlihatkan gejala-gejala yang

dapat ditangkap dan dirasakan oleh indera manusia.

Ketika magma gunung api akan ke luar sebagai lahar panas atau awan panas, maka satwa liar akan turun gunung. Ketika hutan mengalami penggundulan maka tidak akan mampu menahan erosi dan artinya suatu saat dapat terjadi tanah longsor. Ketika sungai mengalami pendangkalan karena timbunan sampah maka tidak memiliki daya tampung yang cukup, sehingga sangat mungkin meluap ketika datang banjir dan hujan deras. Dan jika suplai air sungai surut maka banyak ikan yang melakukan migrasi, dan itu menjadi tanda bahaya kekeringan di sekitarnya. Begitu juga ketika fungsi konservasi air tanah terganggu, maka vegetasi tumbuhan akan berkurang, sehingga udara menjadi lebih panas. Tanda-tanda serupa juga terjadi menjelang bencana tsunami, sayangnya tidak semua masyarakat bahkan pemerintah mengenali tanda-tanda alam tersebut.

Pengalaman empiris Brigjen Suroyo Gino (Wakil Panglima Komando Operasi Darurat Sipil Naggroe Aceh Darussalam ketika melepas pulang 700 prajurit Batalyon 744 setelah selesai menjalankan tugas di NAD, tanggal 26 Desember 2004 di pelabuhan Malahayati. "Menjelang mendekati arah pelabuhan, Gino sempat merasa takjub ketika melihat sekelompok burung berbulu putih berarakan menuju kota. Namun, ketakjuban itu diikuti dengan tanda tanya besar, apa yang akan terjadi dengan alam ini ?" (Suryoprato, 2005). Senada dengan pengalaman tersebut seperti halnya yang terjadi di masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Simeulue NAD yang sudah memiliki pengetahuan tentang tsunami, dengan melihat perubahan perilaku laut

selepas gempa, secara tiba-tiba air laut surut ke tengah antara 0,5 hingga 1 km dan banyak ikan menggelepar di tepi pantai, merupakan pertanda datangnya bencana dahsyat yang mengancam. Juga seorang penyelam Jepang yang sedang menyelam di sebuah perairan kala itu melihat ikan-ikan besar gelisah dan berlindung di gua-gua laut, kemudian penyelam tersebut menangkap firasat akan ada bencana besar yang datang. Pengalaman tersebut merupakan ilustrasi bagaimana sikap tanggap terhadap bencana telah dimiliki oleh sebagian dari masyarakat Indonesia. Sikap tanggap pada bencana tersebut perlu menjadi titik tolak pembelajaran bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan antar generasi.

Belajar dari peristiwa sebagaimana diilustrasikan tadi, tampak bahwa demikian cerdasnya manusia masih terdapat kekurangan, karena tidak memiliki indera yang peka seperti binatang yang mampu menangkap tanda-tanda alam akan datangnya marabahaya. Bertolak dari pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa sikap tanggap terhadap bencana akan terbentuk apabila seseorang memiliki pengetahuan dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Dan pengetahuan kepekaan terhadap bencana ini akan terbentuk melalui:

- a. ada informasi
- b. kesiediaan masyarakat untuk belajar melalui informasi dan gejala alam
- c. mengenali kebiasaan lingkungan
- d. menangkap adanya perubahan alam
- e. sikap antisipatif yang terpola

Untuk dapat memahami perilaku alam dan lingkungan, manusia harus hidup dekat dan menjawai alam. Khususnya

masyarakat yang hidupnya tergantung pada alam, seperti nelayan, petani setiap hari melakukan kontak dengan alam, jauh lebih peka dan mau memperhitungkan terhadap perubahan alam, karena komunitas ini memiliki kepentingan langsung dengan alam. Tetapi kendati masyarakat berada dekat dengan alam, sedangkan kegiatan rutin tidak bersentuhan langsung dengan alam, seringkali membuat mereka tidak peka dan lengah terhadap perubahan alam. Misalnya para pegawai yang bekerja di gedung-gedung tidak bersentuhan langsung dengan keganasan alam akan cenderung melupakan dan mengabaikan alam. Sebab mereka merasa aman dan terlindung, ketika udara berubah panas dapatlah dipencet tombol AC pendingin ruangan untuk mengatur suhu, ketika hujan lebat dan dimungkinkan banjir tidak perlu buru-buru berlari karena sudah terlindung di dinding tebal berlantai ganda. Jika demikian halnya ketajaman naluri untuk menangkap tanda-tanda alam lama-kelamaan akan punah lantaran tidak pernah diasah, sangat terasing dari peristiwa alam yang sesungguhnya, bahkan yang paling menyedihkan adalah manusia sekarang cenderung hidup tidak bersahabat dengan alam. Bukan berarti cara hidup yang demikian adalah salah, namun yang terpenting adalah kepekaan hidup dalam lingkungan yang sesungguhnya juga harus dipupuk dan dilengkapi dengan kecakapan penyelamatan diri, sehingga manusia sebagai bagian dari alam tidak mengeksploitasi alam dan sebaliknya tidak digulung hidup-hidup oleh keganasan alam.

Membentuk sikap tanggap pra bencana memerlukan proses panjang dengan pembelajaran sejak dini.

Kurikulum sekolah sekarang terasing dari pengenalan secara dekat kepada lingkungan. Sangat sedikit media alam dijadikan sebagai ajang belajar. Seringkali alat peraga telah banyak menggantikan obyek yang sesungguhnya yang seharusnya dikenal sejak dini oleh anak. Bagaimana dengan proses belajar dalam masyarakat secara umum untuk membentuk sikap tanggap terhadap bencana. Tentu dalam sistem nilai yang hidup dalam masyarakat harus memiliki muatan peduli terhadap alam. Masyarakat harus merasa menjadi bagian dari alam, sehingga berperilaku positif terhadap alam, merasa memiliki dan sadar untuk menjaga alam. Jika ada sistem nilai ini dikembangkan dan dijiwai maka secara otomatis masyarakat berusaha mempelajari gerak dan geliat alam. Secara berangsur-angsur masyarakat memahami kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian ada pengetahuan yang dimiliki atas bahaya-bahaya alam, termasuk isyarat bahaya dan cara-cara penyelamatan spontan ketika menangkap gejala tersebut akan terbentuk.

Catatan penting setelah mencermati paparan di atas adalah perlunya perubahan sosial melalui pembangunan sosial dan masyarakat yang sensitif terhadap bencana. Pemikiran (*mindset*) masyarakat perlu dibentuk untuk memahami datangnya bencana yang dapat diprediksi secara kasat mata, dan bencana yang hanya dapat diprediksi dengan alat teknologi sebagai bagian untuk berkomunikasi dengan alam dengan memahami geliat dan perubahannya serta pembelajaran untuk melakukan tindakan preventif dan antisiptif secara tepat.

### **Menggali Nilai Kearifan Lokal (local wisdom) Simeulue sebagai Social Capital untuk Mendukung Berbasis Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan**

Simeulue merupakan salah satu kabupaten baru yang terbentuk sejak tahun 1999, sebagai sebuah kepulauan yang berada pada wilayah paling barat Indonesia. Posisi pulau tersebut berada di lepas pantai Meulaboh kira-kira 102 mil. Panjang pulau kurang lebih 100km dan lebar 60km. Penduduk terkonsentrasi 100 meter dari garis pantai yang terletak di sekeliling pulau. Karena ciri geografisnya maka pulau ini sangat rentan terhadap gempa tektonik dengan skala besar dan memungkinkan terjadinya gelombang tsunami. Bagaimanapun letak strategis pegunungan tersebut telah menjadi modal bagi masyarakat pulau tersebut sehingga dalam waktu sekejap lepas dari kejaran tsunami. Simeulue memiliki kekayaan berupa kearifan lokal yang tidak ternilai, sehubungan dengan sikap sadar dan pengetahuan penanganan preventif dan antisipatif dalam menghadapi tsunami. Kearifan lokal tersebut baru-baru ini disebarluaskan melalui media massa, pasca terjadinya gempa tektonik berkekuatan 8,9 skala richter berjarak 43 km dari pulau tersebut dan diikuti tsunami. Kearifan lokal dalam rangka memberikan isyarat darurat penyelamatan diri ke built oleh nenek moyang mereka disebut dengan "smong". Kearifan lokal terhadap bencana dalam hal ini dimaknai sebagai viabilitas atau kemampuan masyarakat untuk untuk memecahkan masalah sendiri dengan melalui sikap tanggap para bencana dan antisipatif saat bencana untuk penyelamatan diri secara darurat dengan mempergunakan strategi yang

tepat berdasarkan pesan lisan antar generasi, yang diyakini kebenarannya. Smong merupakan bahasa Simeulue yang berarti tsunami, yaitu gelombang besar atau air bah yang terjadi setelah terjadi gempa yang dahsyat dengan ditandai surutnya air laut dengan jarak 0,5 hingga 1 km ke arah laut. (wawancara dengan Bupati Simeulue, Senin, 31 Januari 2005) Sedangkan kata tsunami sendiri merupakan serapan dari bahasa Jepang yang berarti gelombang besar yang terjadi di teluk, berasal dari akar kata tsu yang berarti gelombang, dan nami yang berarti teluk. Kata smong telah mentradisi di dalam masyarakat Simeulue secara meluas (Drs. Dharmili, 2005).

Muatan komunikasi bencana dalam tradisi smong di kalangan masyarakat Simeulue ialah apabila terjadi gempa yang dahsyat segera dilakukan pemantauan terhadap air laut atau sungai. Apabila ternyata air laut atau sungai mengalami surut, berarti akan terjadi bencana smong. Dengan demikian teriakan smong merupakan tengara bagi masyarakat untuk segera melakukan penyelamatan diri menjauhi pantai dan menuju tempat yang tinggi. "Smong berarti aba-aba agar masyarakat segera lari ke gunung karena sebentar lagi akan datang air bah." (Kasali & Rhenald, Kompas 2005).

Secara histories di pulau Simeulue masyarakat telah mengenal smong sejak tahun 1907. Istilah smong diciptakan oleh nenek moyang masyarakat Simeulue pada tahun 1907 untuk menamai gelombang besar dan air bah yang terjadi setelah gempa dahsyat. Pada waktu itu sekitar jam 09.00 menurut cerita orang-orang tua, terjadi gempa yang sangat dahsyat, sesaat kemudian diikuti oleh air laut yang surut kurang lebih 0,5

hingga 1 km. Diantara penduduk Simeulue menghadapi pemandangan langka seperti ini ada sebagian yang menaruh curiga bahwa ada yang mengira akan terjadi sesuatu yang luar biasa, namun sebagian dari masyarakat yang tidak menaruh curiga kemudian berhambur ke pantai dan memungut ikan-ikan. Akan tetapi kemudian datanglah ombak yang sangat besar di pantai dan naik ke darat menyapu perkampungan. Masyarakat ada yang sempat menyelamatkan diri ke gunung. Hingga orang-orang yg selamat tersebut mengambil pelajaran penting dari peristiwa tersebut, dan merasa berkewajiban untuk selalu menginformasikan kepada anak keturunan mereka dari generasi ke generasi. Peristiwa yang terjadi tersebut dengan air yang naik hingga puluhan meter dan menghempas daratan disebut dengan smong. (Wawancara dengan Bupati Simeulue, Senin, 31 Januari 2005). Karena peristiwa tersebut dipandang oleh masyarakat sangat luar biasa maka kemudian dijadikan sebagai monumen sejarah tidak tertulis yang disampaikan secara turun temurun, melalui mulut ke mulut (Drs. Dharmili, 2005).

Sungguh kasus ini menarik untuk dipelajari sebagai suatu bukti otentik akan pentingnya paradigma pembangunan *community based disaster risk management*. Akibat dari proses pembangunan dengan mengubah pemikiran masyarakat baik orang per orang maupun dalam suatu komunitas telah memberikan ikatan budaya dan sikap yang luar biasa, terpadu, respons yang sama, dan telah mengilhami terjadinya *self-sustaining capacity*. Hasil internalisasi nilai-nilai “smong” mampu menyelamatkan hampir seluruh

warga pulau itu sehingga tradisi mencapai titik keberlanjutan atau terjaga (*sustainability*) karena masyarakat terpanggil untuk melakukan pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan dan sosial budaya, termasuk menanamkan tradisi “smong” kepada generasi berikutnya secara lebih serius. Berpangkal dari peristiwa ini secara hakiki baik pemerintah maupun masyarakat akan menjiwai “.....pembangunan masyarakat haruslah diartikan sebagai pembangunan untuk mewujudkan *self-sustaining capacity*.” (Tjokrowinoto, 1995: 25).

Khasanah sosial budaya sebagai konsep masyarakat dalam menata ragam hidup merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga. “*Social capital defines the fabric of society....*” atau dikatakan bahwa modal sosial merupakan susunan atau struktur masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini struktur sosial yang memiliki pengaruh positif bagi berkembangnya nilai-nilai lokal untuk keberdayaan lokal. Sedangkan kemampuan manusia dalam menyikapi bencana yang terjadi dengan komunikasi bencana efektif untuk penyelamatan ini merupakan bagian dari modal manusia (*human capital*). Relevansi logis permasalahan ini dengan pendekatan *humanizing* adalah menyadarkan pada pemerintah betapa perlu mengangkat harkat dan martabat manusia. “Dengan cara meningkatkan kualitas SDM akan menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik. Dengan kualitas SDM tersebut maka akan tercapai perubahan sosial yang dicita-citakan.” (Sulistiyani, 2004 : 70). Sedangkan untuk meningkatkan kualitas manusia ini diperlukan proses pembelajaran dalam rangka

mengubah dan atau meningkatkan kemampuan. Adapun proses tersebut meliputi tiga, yaitu *knowledge*, *skills*, *attitudes*. "...ketiganya dapat didefinisikan sebagai peningkatan *knowledge* (kemampuan intelegensia, pengetahuan dan wawasan), *skills* (meningkatkan kecakapan-keterampilan), *attitudes* (pembinaan perilaku sadar dan peduli untuk membangun)." (Sulistiyani, 2004: 70). Dalam konteks penanganan bencana secara preventif dan antisipatif sangat dibutuhkan wawasan pengetahuan masyarakat tentang bencana, tanda-tanda, risiko yang dihadapi, perubahan alam dan lingkungan, dan cara-cara penyelamatan. Untuk dapat melakukan pencegahan khususnya bencana yang terprediksi masyarakat hendaknya memiliki ketrampilan berkaitan dengan teknik-teknik pencegahan. Sedangkan untuk melakukan pencegahan maupun tindakan antisipatif saat bencana diperlukan ketrampilan dan perilaku penyelamatan yang tepat.

#### **Sosialisasi Kearifan Lokal : Program antar Generasi untuk Pelestarian**

Peristiwa alam sebagaimana tsunami yang melanda NAD diperkirakan akan terjadi secara periodik dengan selang waktu kurang lebih satu hingga satu setengah abad. Dilihat dari perkiraan ini, maka peristiwa langka ini akan dialami oleh dua generasi yang berbeda, begitu seterusnya. Bertolak dari pemahaman tersebut berarti akan terjadi permasalahan dalam menjaga kearifan lokal antar generasi. Ancaman pudarnya kearifan lokal seringkali dipicu oleh terjadinya diferensiasi kehidupan sosio kultural di desa itu sendiri. "Diferensiasi sosial yang sudah terjadi di pedesaan sejak lama berjalan tanpa henti. Melunturnya

nilai-nilai komunal.....dirasakan sangat dalam di pedesaan." (Juliantoro & Sunanto, 2000). Kekhawatiran akan hilangnya kearifan lokal sejalan dengan perubahan sosial itu sendiri. Khususnya pengaruh modernitas, pergeseran mata pencaharian dari tergantung kepada alam beralih ke sektor formal, gaya hidup dapat berpengaruh pada eksistensi kearifan lokal. Untuk itulah hendaknya kearifan lokal seperti "smong" dijadikan sebagai program antar generasi. Kearifan lokal sebagai wujud budaya yang terjadi di Simeulue mengajarkan tentang bagaimana berperilaku, dan akan semakin lengkap jika ditambahkan bukan hanya perilaku menyelamatkan diri, namun juga perilaku terhadap alam (Kirschenbaum & Vigoda, 2002). Untuk dapat mengendapkan sikap tersebut diperlukan alih informasi antar generasi berupa komunikasi tradisi dalam wujud komitmen sosial budaya masyarakat setempat. Kepedulian generasi yang mengalami bencana untuk memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi tsunami kepada generasi berikutnya harus dapat dilakukan secara estafet.

Sangat mungkin generasi yang menerima pesan pertama tidak mengalami peristiwa serupa, akan tetapi generasi tersebut tetap harus menjunjung tinggi komitmen untuk menyampaikan kepada generasi sesudahnya. Jika generasi yang tidak mengalami secara langsung atas peristiwa tersebut kemudian mengendur komitmen dan merasa tidak penting menyampaikan berita dan ajaran tradisi ini kepada generasi berikutnya, maka terputuslah informasi penting ini, sehingga akibatnya generasi sesudahnya tidak lagi memiliki khasanah pengetahuan

yang begitu bernilai. Di sinilah letak kekhawatiran akan memudarnya kearifan lokal di wilayah tempat lahirnya tradisi tersebut.

Kearifan lokal akan terjaga dari generasi ke generasi apabila di dalam sistem sosial dan budaya masyarakat tersebut memberikan back-up untuk terjadinya transformasi pengetahuan dan pengalaman secara turun temurun. Ada faktor-faktor pendukung yang memungkinkan terjadinya transformasi yaitu:

- a. komitmen antar generasi
- b. tradisi yang melembaga
- c. dukungan pemerintah
- d. hubungan langsung antara manusia dengan alam
- e. interaksi sosial berjalan secara normal

Komitmen antara generasi dalam rangka menjaga keberlangsungan entitas sosial masyarakat menjadi bagian utama sebagai sarana sosialisasi kearifan lokal. Ketika setiap generasi ada kesadaran akan ancaman kepunahan yang diakibatkan suatu bencana, sebagaimana pernah dialami, maka cenderung akan menjaga generasi berikutnya supaya terhindar dari bencana serupa. Berangkat dari kesadaran ini maka setiap peralihan generasi akan serta merta diikuti oleh pewarisan pengalaman, pengetahuan, tradisi yang dipandang sangat penting untuk menjaga kepunahan tersebut. Belajar dari masyarakat Simeulue pengalaman nenek moyang di tahun 1907 yang ditimpa bencana tsunami telah mengkristal di dalam benak mereka dan menjadi pengetahuan yang luar biasa. Karena masyarakat yang selamat pada waktu itu mengambil pelajaran atas peristiwa tersebut, dan sadar akan ancaman kepunahan yang mungkin terjadi akibat bencana serupa, maka ada

keharusan untuk menularkan dan menginternalisasikan kepada generasi berikutnya. Dengan pentingnya penyampaian pesan-pesan khusus tersebut setiap peralihan generasi, maka terangkatlah nilai-nilai lokal yang berakar pada pengalaman dan kesadaran lokal tersebut menjadi sebuah tradisi. Setiap peralihan generasi harus diikuti oleh pembekalan pengetahuan dan kesadaran lokal tersebut. Dan ini berlangsung dengan melalui penuturan dari mulut ke mulut, dari generasi tua pada umumnya kepada generasi muda, dari orang tua kepada anak dan cucunya. Karena nilai tradisi tersebut menyangkut jaminan keselamatan masyarakat, maka setiap orang memiliki kewajiban bahkan telah menjadi semacam kebutuhan untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya, dan bahkan kepada para pendatang yang tidak memiliki pengetahuan tentang peristiwa tersebut menjadi bagian yang harus mendapat pembelajaran.

Seperti disampaikan Bupati Simeulue (wawancara, Senin, 31 Januari 2005), bahwa sesungguhnya tidak ada sarana modern yang digunakan untuk mensosialisasikan "smong", kecuali hanya melalui ikatan tradisi dari mulut ke mulut. Dalam hal ini belum ada hikayat tertulis dan dibukukan, atau pengabdian peristiwa "smong" ke dalam cerita rakyat, kesenian daerah, sehingga menjadi informasi yang lebih formal. Namun demikian melalui komunikasi informal dan tradisi lokal telah secara efisien dapat tersosialisasikan dan telah berhasil membentuk persepsi serta sikap tanggap terhadap bencana kepada semua lapisan masyarakat Simeulue yang hidup tersebar di desa-desa yang berjauhan (Drs. Dharmili, 2005).

Bukti sikap tanggap terhadap bencana masyarakat Simeulue dapat dicermati melalui penyelamatan diri masyarakat dengan mengikuti petuah yang terangkum di dalam muatan tradisi “smong” tersebut, dengan menjauhi pantai dan naik ke atas bukit. (Wawancara dengan Kapolres, Senin 31 Januari 2005). Hal itu membuktikan bahwa internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai lokal yang berkiblat pada pengalaman masa lampau dapat berlangsung secara efektif, kendati hanya melalui pemberitahuan dari mulut ke mulut (Tejo Wijanarko, 2005).

Kearifan lokal “smong” yang dimiliki oleh masyarakat Simeulue telah terbukti memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara luas dan berdampak positif. Kekuatannya begitu luar biasa untuk membentuk kesiagaan yang bersifat antisipatif dalam menghadapi bencana. Artinya sesaat datangnya bencana gempa dahsyat terjadi masyarakat dengan berdasarkan pengetahuannya yang telah diyakini kebenarannya tersebut, telah membimbingnya untuk menyelamatkan diri ke atas bukit. Dengan demikian kemampuan antisipasi saat bencana dapat berlangsung secara efektif. Hal ini terbantu dengan kondisi geografis tempat tinggal penduduk yang tersebar di pantai hanya berjarak 100 m hingga 1 km dari perbulitan. Kondisi alam telah memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam waktu pendek dapat menjangkau tempat yang tinggi dan terlepas dari hempasan gelombang. Dengan kata lain keselamatan masyarakat Simeulue selain disebabkan oleh kearifan lokal juga difasilitasi oleh alam yang memiliki

karakteristik sesuai dengan letak strategis (dr. Hanif, 2005).

Pembelajaran dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat Simeulue perlu dilakukan pelestarian, supaya terjaga dalam alih generasi. Manifestasi dalam masyarakat selama ini ada tradisi kesenian yang berkembang, yaitu penuturan kisah-kisah dan cerita rakyat yang diikuti oleh pelantunan pantun. Kesenian ini merupakan kesenian rakyat yang sering dilakukan pada acara-acara tertentu, dengan mengisahkan perjuangan hidup, kisah remaja, nasib dan berpantun, kesenian ini disebut “nandone”. Sosialisasi “smong” untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi bagian dari tradisi “nandone” ini.” Rencana ini merupakan langkah strategis untuk dapat mengkomunikasikan “smong” dari generasi ke generasi. Dan peristiwa tsunami tentunya memiliki kekayaan kisah sedih dan bahagia berkenaan dengan perjuangan untuk hidup dalam kondisi darurat yang sangat menyentuh. Banyak judul kisah yang dapat dibangun dengan inspirasi tsunami tersebut. Di samping rencana yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal ini juga direncanakan:

- a. Pembangunan fisik monumen “smong” yang berisi foto dan gambar-bambar kerusakan akibat tsunami.
- b. Mengajukan kepada masyarakat untuk membangun pondok-pondok kecil di bukit sebagai tempat pengungsian darurat jika terjadi gempa hebat dan tsunami. Pondok-pondok tersebut semua diberi nama “pondok smong.”
- c. Tetap menjaga intensitas penuturan pengalaman “smong” dari mulut ke mulut

termasuk kepada para pendatang.

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan memberikan pembelajaran kepada masyarakat dari generasi ke generasi secara lebih efektif. Monumen merupakan bukti sejarah yang mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang apa yang pernah terjadi di pulau tersebut. Sedangkan “pondok smong”, nama itu akan mengundang tanya khususnya anak-anak kecil, mengapa semua pondok di bukit namanya “pondok smong”. Ketika anak-anak bertanya kepada orang tuanya, maka saat itu dijadikan sebagai event penting untuk mengisahkan tsunami dan cara penyelamatan diri. Namun demikian dalam pembangunan pondok-pondok ini hendaknya masyarakat dan pemerintah memperhitungkan kelestarian hutan dan pegunungan dari ancaman penggundulan dan longsor (Kumalahadi, Kedaulatan Rakyat 2005).

Berkenaan dengan pemikiran ini maka kepada masyarakat ditanamkan kesadaran untuk:

- a. Menanam dan memelihara mangrove (bakau), melestarikan pantai dengan tanpa merusak karang. Dan untuk menjaga kelestarian ini akan dipasang larangan pengambilan karang dan penebangan bakau, serta diterbitkan Surat Keputusan Bupati. Itu semua dilakukan dalam rangka membangun pengamanan pantai.
- b. Tempat tinggal masyarakat hendaknya dalam relokasi nanti masyarakat tinggal di dekat jalan yang bersebelahan dengan gunung dan bukan bersebelahan jalan menuju

pantai, sehingga memiliki akses penyelamatan diri dengan lebih cepat. Dalam pengaturan lebih lanjut akan diterbitkan perda.

- c. Akan diperbanyak pembangunan jalan akses ke gunung, sehingga memperlancar proses penyelamatan diri bagi masyarakat apabila terjadi tsunami.

Rencana tersebut merupakan sikap pemerintah daerah yang responsif terhadap ancaman tsunami. Kendati demikian penyelesaian masalah khususnya berkenaan dengan tsunami, sebaiknya diimbangi dengan pelestarian aset-aset perlindungan dan pertolongan darurat. Salah satu kekayaan pulau ini adalah perbukitan yang berada di sepanjang pulau, merupakan aset pertolongan darurat yang harus dijaga kelestariannya, sebagai penyeimbang. Khususnya ide pembangunan pondok “smong” harus dirancang dengan pertimbangan konservasi yang memadai. Dengan demikian tidak terjadi eksploitasi masyarakat terhadap hutan dan bukit. Jika pembangunan pondok “smong” terjadi tanpa perhitungan sangat dimungkinkan perbukitan yang ada tidak lagi kemampuan sebagai lokasi penyelamatan karena banyak pohon ditebang, sehingga konsentrasi tanah yang terbuka mencapai areal yang lebih luas.

Rencana pembangunan fisik dan sosial hendaknya menjadi perpaduan yang seimbang. Di dalam mengembangkan kota-kota pantai juga mempertimbangkan konservasi yang tepat, dengan menanamkan perilaku masyarakat untuk mengembangkan sikap dan rasa

memiliki terhadap alam dan lingkungan.

Arah pemberdayaan masyarakat berkenaan dengan kelangsungan hidup masyarakat di pulau tersebut perlu dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berpihak pada pelestarian lingkungan hidup. Menurut Djojohadikusumo dalam (Sulistiyani, 2004: 66), upaya pelestarian alam mengandung tiga dimensi: pertama, meningkatkan efisiensi pada penggunaan sarana produksi yang mengurangi permintaan terhadap berbagai jenis sumber daya alam dalam proses produksi, kedua, mendorong dan memberi insentif terhadap penerapan teknologi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ketiga, melakukan investasi (tambahan) dalam hal pemeliharaan dan pengamanan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sedangkan dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat hendaknya melalui proses pemberdayaan yang tepat. Adapun pemberdayaan tersebut mencakup empat komponen, yaitu pembentukan dan atau peningkatan kognitif (kemampuan penalaran, wawasan dan pengetahuan), konatif (sikap perilaku masyarakat yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan sosial, ekonomi, fisik yang bertanggung jawab), afektif (sense yang dimiliki untuk dikembangkan ke arah rasa kesadaran untuk memelihara dan melestirikan lingkungan) dan psikomotorik (kecakapan-keterampilan memperbaiki, memanfaatkan dan mengolah lingkungan alam secara bertanggung jawab). Jika proses pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan baik maka

*sustainability* baik penanganan masalah social dan fisik berkenaan dengan usaha preventif dan antisipatif terhadap bencana alam dapat lebih terpadu.

### **Kesimpulan**

Bertolak dari makna pentingnya kearifan lokal, khususnya dalam menghadapi bencana alam, diperlukan pembelajaran antar generasi, dan bahan pembelajaran bagi masyarakat lainnya, dengan menekankan komitmen melalui sistem budaya yang mengakar dalam masyarakat. Bagian yang tidak terlupakan dari upaya penanaman tradisi ini hendaknya dilandasi dengan pengetahuan terhadap alam dan rasa bersahabat dengan alam. Untuk menjaga kelangsungan kearifan lokal hendaknya ditunjang oleh sarana berupa kelembagaan sosial yang menjamin bagi proses internalisasi nilai-nilai lokal tersebut secara efektif. Kelembagaan seperti disusunnya hikayat, tradisi kesenian rakyat yang memuat pesan-pesan penting berkenaan dengan bencana alam, menjadi bagian untuk menjaga kemurnian nilai-nilai lokal sebagai kearifan lokal yang dikembangkan sebagai rujukan antar generasi. Di samping itu pembangunan fisik dan kebijakan pemerintah lokal hendaknya juga memberikan dukungan bagi berlangsungnya sosialisasi kearifan lokal antar generasi. Perubahan sosial dan pembangunan sosial masyarakat dilangsungkan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan yang didukung oleh kearifan lokal yang terjaga antar generasi. Keinginan tersirat yang dapat dijawab melalui pengembangan

kearifan lokal sebagai modal sosial adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik secara fisik maupun sosial yang saling mendukung satu sama lain.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat langsung dalam melancarkan penulisan ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

### Referensi

#### Artikel jurnal:

Fedryansyah, M., & Pancasilawan, R. (2018). Penanggulangan Bencana oleh Organisasi Lokal di Kecamatan Jatinangor. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 136–141.

Filimonau, V., & De Coteau, D. (2020). Tourism resilience in the context of integrated destination and disaster management (DM<sup>2</sup>). *International Journal of Tourism Research*, 22(2), 202–222. <https://doi.org/10.1002/jtr.2329>

Nurdin, R. (2015). Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 1(1).

Siregar N. (2017). Implementasi Making Aceh Safer Through Disaster Risk Reduction in Development (DRR-A) Project Oleh United Nations Development Programme (UNDP) Dalam Upaya Mengurangi Risiko Bencana di Aceh 2009-2012. *EJournal Ilmu*

*Hubungan Internasional*, 5(3), 775–788.

Stanley Jaya Kumar, G. (2000). Disaster management and social development. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 20(7), 66–81. <https://doi.org/10.1108/01443330010789007>

Kirschenbaum, A., & Vigoda, E. (2002). *The organization of chaos: the structure of disaster management* (Vol. 99). PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY.

#### Buku:

Juliantoro, D., & Sunanto, H. (2000). *Menggeser Pembangunan, Memperkuat Rakyat: Emansipasi dan Demokrasi Mulai dari Desa*. Yogyakarta: Lapera.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: PT Gava Media.

Supriatna, T. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tjokrowinoto, M. (1995). *Teori Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

#### Media Massa:

Kasali, & Rhenald. (2005, January 24). Smoong yang Selamatkan Warga Simeulue. *Kompas*.

Kumalahadi. (2005, January 3).  
Pelajaran penanganan Bencana  
Tsunami. *Kedaulatan Rakyat*.

Suryopratomo. (2005, January 1).  
Ketika Kawanan Burung Putih  
Berarakan ke Tengah Banda  
Aceh. *Kompas*.

**Wawancara:**

dr. Hanif. (2005, January 31).  
*Wawancara Kepala Puskesmas  
Simeulue Timur dan Kepala PMI  
Kab. Simeulue, Senin 31 Januari  
2005, jam 11.30-12.00.*

Drs. Dharmili. (2005, January 1).  
*Wawancara Bupati Simeulue (dr.  
Hanif). Kepala Puskesmas  
Simeulue Timur dan Kepala PMI  
Kab. Simeulue, Senin 31 Januari  
2005, jam 11.30-12.00.*

Tejo Wijanarko. (2005, January 31).  
*Wawancara Kapolres Simeulue  
(Tejo Wijanarko), Senin 31  
Januari 2005, jam 15.30-16.00.*